



PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POSO

Abdul. Khalid Hs. Pandipa

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sintang Maroso, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel

Kata Kunci:

Fungsi Manajemen,
Kinerja

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey. Data primer yang di kumpulkan adalah data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan hasil jawaban quisioner. Sedangkan untuk data sekunder metode pengumpulan datanya dilakukan selain melalui studi pustaka, juga melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan variabel dan indikator yang sudah di tetapkan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso, secara umum dapat dikatakan belum di jalankan atau di laksanakan sebagaimana yang di harapkan. Hal ini di ketahui dari capaian masing-masing indikator; (1) Perencanaan yang berkaitan dengan pengimplementasian kegiatan penyuluhan, sebagian besar responden (67 %) mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan, belum pernah di lakukan; (2) Perencanaan yang berkaitan dengan Pengutusan Pegawai/ Petugas Untuk Mengikuti Pelatihan, sebagian besar responden (73 %) mengatakan bahwa belum ada petugas/ pegawai yang di utus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penanggulangan dini resiko bencana; (3) Perencanaan yang berkaitan dengan Pengembangan SDM, sebagian besar responden (87 %) mengatakan bahwa selama ini belum ada pegawai yang di utus untuk mengikuti pendidikan (formal) yang spesialisasinya berkaitan dengan peristiwa bencana; (4) factor financial di anggap sebagai factor yang mempengaruhi penerapan fungsi manajemen terhadap kinerja penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso

Kesimpulan dan saran : Secara umum, Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso belum di laksanakan sebagaimana yang di harapkan. Untuk itu di sarankan: hendaknya rencana kegiatan penyuluhan tentang penanggulangan resiko bencana kepada masyarakat dapat di laksanakan minimal se-tahun se-kali. Hal ini penting untuk lakukan, agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara penanggulang dini resiko bencana ketika bahaya bencana akan terjadi. Guna mengantisipasi atau meminimalisir kerugian yang akan terjadi ketika bencana terjadi, maka pengetahuan dan ketrampilan pegawai/ petugas tentang penanggulangan resiko bencana perlu di tingkatkan melalui pengutusan pegawai/ petugas pada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana di maksud. Guna kepentingan BPBD dan masyarakat secara menyeluruh terkait dengan penanggulangan dini resiko bencana, hendaknya spesialisasi pegawai tentang penanggulangan dini resiko bencana dapat di tingkatkan melalui jalur pendidikan formal yang konsentrasi ilmunya erat kaitannya dengan masalah-masalah resiko bencana di maksud.

© 2013 Universitas Sintang Maroso

PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun di sisi lain juga kaya akan sumber daya alam.

Pada umumnya resiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung apai), bencana akibat hydrometrologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perancangan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat di laksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang di lakukan selama ini belum di dasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Respon atas Undang-Undang Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sebagai wilayah integral Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya di singkat BPBD). Adapun maksud dan tujuan dari pada pembentukan Badan ini, adalah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat daerah Kabupaten Poso pada khususnya.

Sebagai suatu lembaga organisasi perangkat daerah Kabupaten Poso yang bergerak di

bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Poso di nilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana ketika bencana di maksud terjadi di wilayah daerah Kabupaten Poso. Sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam Bab II pasal 2 di sebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas pokok : Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulungan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

Untuk pelaksanaan tugas pokok tersebut, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu;
- b. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan, menetapkan dan menginformasikan penanganan bencana;
- d. Penyusunan dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja Negara APBD; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi BPBD tersebut di atas, hanya akan dapat terselenggara dengan baik bilamana BPBD bersangkutan mampu melakukan suatu tindakan pendektasian awal terhadap bencana yang mungkin akan terjadi serta mampu membuat semacam rencana operasional ketika bencana terjadi. Pada tataran inilah, BPBD dituntut untuk mampu merancang suatu rencana operasi darurat dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien. Artinya, dalam hal ini BPBD dituntut untuk mampu menerapkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien melalui salah satu fungsinya,

yakni; perencanaan. Sebagai salah satu dari pada fungsi manajemen, perencanaan dapat berfungsi sebagai suatu tindakan awal di dalam menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi serta mampu mengatasi ketika bencana terjadi. Disinilah juga peran penting fungsi manajemen sebagai suatu metode yang berurusan dengan kompleksitas cara penanggulangan bencana yang berubah sangat cepat dengan derajat ketidakpastian yang cukup tinggi dan sering kali erat kaitannya dengan kebutuhan akan adanya perencanaan. Terlebih lagi sebagai salah satu dari pada fungsi manajemen, perencanaan penanggulangan bencana merupakan suatu kegiatan merencanakan yang lebih bersifat komprehensif dalam arti memfokuskan pada analisis yang terkait dengan lingkungan eksternal dan lingkungan internal di dalam menentukan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh BPBD terkait dengan rencana aksi penanggulangan bencana itu sendiri.

TEORI DAN KONSEP

Teori Manajemen

Dalam *Encyclopedia of the Social Science* dikatakan bahwa manajemen 'adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi'. Selanjutnya, Haiman mengatakan 'bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama'.

Akhirnya, George R. Terry mengatakan 'bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain'.

Bila kita perhatikan ketiga definisi di atas, maka akan segera tampak bahwa ada tiga pokok penting dalam definisi-definisi tersebut, yaitu *pertama*, adanya tujuan yang ingin dicapai; *kedua*, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang-orang lain; dan *ketiga*, kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.

Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Dalam arti singular (tunggal), disebut pimpinan. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain.

Apakah yang dimaksud dengan aktivitas manajemen itu? Dengan aktivitas manajemen dimaksudkan kegiatan-kegiatan atau

fungsi-fungsi yang dilakukan oleh setiap manajer. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan manajer dan aktivitas manajer itu adalah *planning, organizing, staffing, directing*, dan *controlling*. Ini sering pula disebut dengan istilah proses manajemen, fungsi-fungsi manajemen, bahkan ada yang menyebutnya unsur-unsur manajemen.

Menurut pengertian yang ketiga, manajemen itu adalah seni atau suatu ilmu. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni, golongan lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenaran.

Memperlihatkan pengertian manajemen yang pertama serta kenyataan bahwa manajemen itu adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen itu dapat diberi definisi sebagai "*Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahannya, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.*"

Fungsi-Fungsi Manajemen

Berbagai pendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen akan tampak jelas dengan dikemukakannya pendapat beberapa penulis sebagai berikut:

- a. Louis A. Allen : *Leading, Planning, Organizing, Controlling*.
- b. Prajudi Atmosudirdjo : *Planning, Organizing, Directing*, atau *Actuating, Controlling*.
- c. John Robert Beishline, Ph. D : *Perencanaan, Organisasi, Komando, Kontrol*.
- d. Henry Fayol : *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*.
- e. Luther Gullich : *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*.
- f. Koontz dan O'Donnel : *Organizing, Staffing, Directing, Planning, Controlling*.
- g. William H. Newman : *Planning, Organizing, Assembling, Resources, Directing, Controlling*.
- h. Dr. S. P. Siagian., M.P.A : *Planing, Organizing, Motivating, controlling*.

Pada hakikatnya, bila dikombinasikan pendapat kedelapan penulis di atas, maka fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. *forecasting*,
- a. *planning* termasuk *budgeting*,
- b. *organizing*;
- c. *staffing* atau *assembling resources*,
- d. *directing* atau *commanding*.,
- e. *leading*,
- f. *coordinating*,

- g. *motivating*,
- h. *controlling*, dan
- i. *reporting*

Konsep Kinerja

Konsep kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* yang artinya daya guna, prestasi dan hasil. "Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Keban,1995:1)." Sedangkan Prawirosentono (1999:2) mengemukakan kinerja (*performance*) adalah :

Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Sedangkan Bernardi dan Russel (1998:239) mendefinisikan bahwa *performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Jennergeren bahwa pengertian *performance* yaitu "tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai (Steer,1980:21)".

Berdasarkan pendapat di atas, kinerja (*performance*) merupakan tolak ukur bagi berhasil atau tidaknya organisasi dalam merealisasikan secara efektif tujuan dan misinya selama waktu tertentu. Hal ini berarti penilaian kinerja suatu organisasi memiliki kedudukan sangat penting untuk melihat tingkat efektivitas yang telah dan akan dicapai organisasi.

METODE PENELITIAN.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian survei yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan melakukan pencatatan tentang segala peristiwa yang terjadi pada objek yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk kemudian di olah dan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

Jenis data yang akan di kumpulkan masing-masing adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diterima langsung dari responden melalui kuisioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan

tertulis yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai yang ada pada BPBD Kabupaten Poso yang berjumlah 60 orang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2002 : 57). Sehubungan dengan hal ini, maka yang akan di jadikan sampel dalam penelitian ini adalah mereka yang di anggap mengerti dan memahami akan maksud dan tujuan penelitian (teknik *purposive sampling*).Data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan segala peristiwa atau kejadian yang ada pada objek penelitian secara apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso.

Kompleksitas dari permasalahan bencana, memerlukan suatu penataan atau perancangan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat di laksanakan secara terarah dan terpadu.

Sebagai suatu lembaga organisasi perangkat daerah Kabupaten Poso yang bergerak di bidang penyelenggaraan penanggulangan resiko bencana, BPBD Kabupaten Poso di nilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan kegiatan penanggulangan resiko bencana ketika bencana di maksud terjadi di wilayah daerah Kabupaten Poso.

Tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Poso di dalam penanggulangan resiko bencana tersebut, hanya akan dapat terselenggara dengan baik bilamana BPBD bersangkutan mampu melakukan suatu tindakan pendektesian awal melalui suatu rencana operasional terhadap bencana yang mungkin akan terjadi. Pada tataran inilah, fungsi manajemen BPBD di dalam penanggulangan resiko bencana di maksud di nilai penting untuk di terapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada bagian ini akan di lakukan analisis dan pembahasan mengenai fungsi manajemen terhadap kinerja penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Poso, berdasarkan variabel dan indikator yang sudah di tetapkan sebelumnya. Adapun variabel fungsi manajemen di maksud, adalah; fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan. Sedangkan indikator (alat

ukur) yang akan di gunakan untuk melihat apakah kegiatan perencanaan di maksud sudah di laksanakan atau belum, masing-masing dapat di lihat dari; ada tidaknya kegiatan penyuluhan, ada tidaknya pengutusan pegawai/ petugas untuk mengikuti pelatihan, dan ada tidaknya pengembangan SDM. Jika ketiga hal ini ada atau sudah di lakukan oleh BPBD, maka kinerja BPBD yang berkaitan dengan rencana penanggulangan resiko bencana dapat di katakan, optimal. Sebaliknya, Jika ketiga hal ini belum di lakukan oleh BPBD, maka kinerja BPBD yang berkaitan dengan rencana penanggulangan resiko bencana dapat di katakan, belum optimal.

1. Fungsi Perencanaan; Penyuluhan.

Yang di maksud dengan penyuluhan dalam pembahasan ini, adalah: suatu rangkaian kegiatan pengimplementasian rencana penyuluhan terhadap masyarakat. Rencana kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat seperti ini, di nilai penting untuk di

lakukan oleh BPBD, agar apa yang menjadi tujuan dari tugas utama BPBD terkait dengan rencana penanggulangan resiko bencana dapat terlaksana dengan baik. Artinya, dengan adanya pengimplementasian rencana penyuluhan terhadap masyarakat seperti ini, di harapkan akan melahirkan suatu kerjasama yang baik antara BPBD (sebagai lembaga) dengan masyarakat di dalam penanggulangan bencana yang akan terjadi. Olehnya, kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan rencana penanggulangan resiko bencana, di nilai penting untuk di lakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui apakah rencana kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana terhadap masyarakat sudah di laksanakan atau belum, berikut akan di tampilkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan kuisisioner seperti yang terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4
Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Yang Terkait Dengan :
Penyuluhan Tentang Penanggulangan Dini Resiko Bencana Kepada Masyarakat

Jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
Sudah	3	10
Belum	20	67
Tidak tahu	7	23
Jumlah	30	100 %

Sumber : Data di Olah, 2013.

Sehubungan dengan hal ini, berikut akan di tampilkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber “ B” dalam suatu wawancara, mengatakan :

... Memang benar pak' kalau di katakan bahwa penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan aksi penanggulangan dini resiko bencana kepada masyarakat, belum pernah di lakukan. Padahal, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang penanggulangan dini resiko bencana seperti ini, menurut saya penting untuk di lakukan, agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara menanggulangi bencana ketika musibah bencana itu terjadi. (Wawancara, April 2013).

Selanjutnya, hal yang sama juga dikemukakan oleh salah seorang narasumber “ E “ dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan :

Kalau yang saya ketahui, kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan penanggulangan dini resiko bencana kepada masyarakat memang belum pernah di lakukan. Namun demikian, tidak berarti hal itu tidak akan di lakukan. Hingga kini, program-program penyuluhan seperti ini, setahu saya lagi sedang di buat oleh instansi kami. (Wawancara, April 2013).

Dari hasil kutipan wawancara seperti yang terlihat di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita bahwa kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan penanggulangan dini resiko bencana kepada masyarakat, belum pernah di lakukan oleh BPBD.

Bertolak dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan quisioner dan hasil wawancara seperti yang sudah di paparkan di atas, maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penerapan fungsi perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tentang

penanggulangan dini resiko bencana kepada masyarakat, belum di jalankan oleh BPBD.

2. Fungsi Perencanaan; Pengutusan Pegawai/ Petugas Untuk Mengikuti Pelatihan.

Yang di maksud dengan pengutusan petugas/ pegawai untuk mengikuti pelatihan dalam pembahasan ini, adalah: suatu rangkaian kegiatan pengimplentasian rencana pengutusan petugas/ pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh departemen/ dan atau instansi tertentu. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan dini resiko bencana seperti ini, di nilai penting untuk di ikuti oleh petugas/ pegawai BPBD, guna menambah pengetahuan dan ketrampilan petugas/ pegawai di dalam menangani resiko bencana. Artinya, dengan adanya

pengetahuan dan ketrampilan petugas/ pegawai terkait dengan penanganan resiko bencana seperti ini, setidaknya kerugian yang di akibatkan oleh bencana (jika hal itu terjadi) akan dapat di minimalisir. Olehnya, pengutusan petugas/ pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana, di nilai penting untuk di lakukan oleh BPBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui apakah rencana yang berkaitan dengan pengutusan petugas/ pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sudah di laksanakan atau belum, berikut akan di tampilkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan kuisisioner seperti yang terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5
Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Yang Terkait Dengan :
Pengutusan petugas/ pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

Jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
Sudah	2	7
Belum	22	73
Tidak tahu	6	20
Jumlah	30	100 %

Sumber : Data di Olah, 2013.

Sehubungan dengan hal ini, berikut akan di tampilkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber “ A” dalam suatu wawancara, mengatakan :

Kalan yang saya ketahui, selama ini belum pernah ada petugas/ pegawai yang di utus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan dini resiko bencana seperti yang Bapak maksud. Padahal pelatihan-pelatihan seperti ini, penting untuk di ikuti oleh petugas/ pegawai guna menambah pengetahuan petugas/ pegawai di dalam menangani resiko bencana Bagaimana mungkin resiko bencana akan teratasi dengan baik kalau petugas/ pegawai tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan tentang cara menanggulangi resiko bencana (wawancara, April 2013).

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh narasumber “ T “ dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan :

Saya kira pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana, penting untuk di ikuti oleh petugas/ pegawai guna menambah

pengetahuan dan ketrampilan petugas/ pegawai ketika di perhadapkan dengan persoalan resiko bencana Namun sepengetahuan saya, pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana seperti ini, belum pernah di ikuti oleh petugas/ pegawai ... (Wawancara, April 2013).

Dari hasil kutipan wawancara seperti yang terlihat di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita bahwa selama ini belum pernah ada petugas/ pegawai yang di utus atau di ikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana.

Bertolak dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan quisioner dan hasil wawancara seperti yang sudah di paparkan di atas, maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penerapan fungsi perencanaan yang berkaitan dengan pengutusan petugas/ pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan dini resiko bencana, belum di jalankan oleh BPBD.

3. Fungsi Perencanaan : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Yang di maksud dengan fungsi

perencanaan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pembahasan ini, adalah: suatu rangkaian kegiatan pengimplementasian rencana pengembangan SDM pegawai BPBD melalui pendidikan formal. Pengembangan SDM pegawai melalui pendidikan formal seperti ini, di nilai penting untuk di lakukan oleh BPBD, agar spesialisasi ilmu pengetahuan pegawai yang berkaitan dengan resiko bencana, benar-benar dapat di manfaatkan oleh BPBD dalam penanggulangan dini resiko bencana. Artinya, dengan adanya pegawai yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan resiko bencana seperti ini, peristiwa resiko bencana yang

mungkin akan terjadi akan lebih cepat di ketahui oleh BPBD (sebagai lembaga yang paling berkompeten untuk itu) yang kemudian dapat mengantisipasi secara dini segala kemungkinan yang akan di timbulkan oleh bencana di maksud. Olehnya, pengembangan SDM pegawai seperti ini, di nilai penting untuk di lakukan oleh BPBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui apakah perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan SDM pegawai melalui pendidikan formal sudah di laksanakan atau belum, berikut akan di tampilkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan kuisioner seperti yang terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 6
Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Yang Terkait Dengan :
Pengembangan SDM pegawai melalui pendidikan formal.

Jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
Sudah	-	-
Belum	26	87
Tidak tahu	4	13
Jumlah	30	100 %

Sumber : Data di Olah, 2013.

Sehubungan dengan hal ini, dari hasil observasi peneliti pada objek yang di teliti, di ketahui bahwa tingkat pendidikan rata-rata yang di miliki oleh pegawai (khususnya PNS) BPBD adalah Strata 1 (S1). Terkait dengan hal ini, jika di lihat dari potensi SDM pegawai yang ada, sesungguhnya sudah cukup memadai. Namun sayangnya, jika di lihat dari spesialisasi (dalam hal ini basic S1) ilmu pengetahuan yang di miliki pegawai, praktis belum ada satu pegawapun yang memiliki basic ilmu yang relevan dengan bidang tugas utama dari pada BPBD, yakni; penanggulangan bencana (Lihat Tabel 3). Padahal, paling tidak BPBD (sebagai lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan resiko bencana) sudah harus memiliki satu atau dua orang pegawai yang memiliki basic ilmu yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana tersebut. Dengan adanya satu atau dua orang pegawai yang memiliki basic ilmu yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana di maksud, sesungguhnya akan sangat membantu BPBD di dalam melakukan pendektasian awal maupun penanggulangan dini resiko bencana yang mungkin akan terjadi. Sehubungan dengan hal ini, berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang

narasumber “ T “ dalam suatu wawancara, mengatakan :

..... Saya sependapat dengan Bapak kalau di katakan bahwa BPBD sudah harus memiliki satu atau dua orang pegawai yang memiliki basic ilmu yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana. Karena menurut saya, bagaimana mungkin pegawai yang ada sekarang ini bisa mendeteksi secara dini terhadap bahaya resiko bencana kalau pegawai bersangkutan tidak memiliki basic ilmu di maksud ? latar belakang pendidikan pegawai yang ada sekarang ini, belum ada satupun yang memiliki basic ilmu yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di maksud. (wawancara, April 2013).

Selanjutnya dengan nada yang sama juga di ungkapkan oleh narasumber lain “ M “ dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan :

Kalau di lihat dari basic ilmu pegawai yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana, setahu saya memang belum ada. Sehubungan dengan hal ini, secara teknis dan operasional, pegawai yang ada sekarang ini bisa di katakan tidak mampu untuk melakukan pendektasian awal terhadap kemungkinan bencana. (Wawancara, April 2013).

Dari hasil kutipan wawancara seperti yang terlihat di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita bahwa latar belakang pendidikan pegawai BPBD yang ada sekarang ini, belum ada yang relevan dengan tugas utama BPBD di dalam penanggulangan resiko bencana.

Bertolak dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan kuisisioner dan hasil wawancara seperti yang sudah di paparkan di atas, maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penerapan fungsi perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan SDM pegawai, belum di jalankan oleh BPBD.

Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Fungsi manajemen Terhadap Kinerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Suatu organisasi (tidak terkecuali organisasi pemerintah daerah) tidak akan pernah berjalan dengan baik, kalau organisasi bersangkutan tidak di dukung oleh kemampuan finansial yang memadai.

Demikian halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso (sebagai perangkat organisasi pemerintah daerah). Sebagai lembaga yang mempunyai tugas utama di bidang penanggulangan resiko bencana daerah, kinerja BPBD dalam penanggulangan resiko bencana di maksud tidak akan pernah optimal kalau fungsi manajemen pada BPBD yang berkaitan dengan pengimplementasian rencana kegiatan tidak di dukung dengan finansial yang memadai. Pada tataran inilah, faktor yang di anggap dapat mempengaruhi fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengimplementasian fungsi perencanaan BPBD, adalah faktor finansial.

Seperti yang telah di kemukakan pada Bab sebelumnya, bahwa Finansial adalah merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Adanya finansial, dalam suatu organisasi, selain faktor SDM dan sarana fisik lainnya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik apapun harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Karena aspek finansial dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi.

KESIMPULAN.

1. Bahwa penerapan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengimplementasian

rencana penyuluhan tentang penanggulangan resiko bencana kepada masyarakat, belum di lakukan. Hal ini di ketahui dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan kuisisioner yang berkaitan dengan penyuluhan tentang penanggulangan dini resiko bencana kepada masyarakat, di mana dari seluruh responden yang berjumlah 30 orang, sebagian besar responden (67 %) mengetahui kalau kegiatan penyuluhan di maksud, belum pernah di lakukan.

2. Bahwa penerapan fungsi manajemen yang berkaitan dengan **rencana pengutusan petugas/ pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan** yang di adakan oleh departemen/ dan atau instansi tertentu, belum di lakukan. Hal ini di ketahui dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan kuisisioner yang berkaitan dengan pengutusan petugas/ pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, di mana dari seluruh responden yang berjumlah 30 orang, sebagian besar responden (73 %) mengatakan bahwa belum ada petugas/ pegawai yang di utus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penanggulangan dini resiko bencana.
3. Bahwa penerapan fungsi manajemen yang berkaitan dengan **rencana pengembangan SDM pegawai** melalui pendidikan formal, belum di lakukan. Hal ini di ketahui dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaankuisisioner, di mana dari seluruh responden yang berjumlah 30 orang, sebagian besar responden (87 %) mengatakan bahwa selama ini belum ada pegawai yang di utus untuk mengikuti pendidikan (formal) yang spesialisasinya berkaitan dengan peristiwa bencana.
4. Bahwa **factor financial** di anggap sebagai factor yang mempengaruhi penerapan fungsi manajemen terhadap kinerja penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso.

SARAN

1. Guna optimalisasi kinerja BPBD dalam penanggulangan resiko bencana, hendaknya rencana kegiatan penyuluhan tentang penanggulangan resiko bencana kepada masyarakat dapat di dilaksanakan minimal setahun se-kali. Hal ini penting untuk lakukan, agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara penanggulang dini resiko bencana ketika bahaya bencana akan terjadi.

2. Guna mengantisipasi atau meminimalisir kerugian yang akan terjadi ketika bencana terjadi, maka pengetahuan dan ketrampilan pegawai/ petugas tentang penanggulangan resiko bencana perlu di tingkatkan melalui pengutusan pegawai/ petugas pada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana di maksud.
 3. Guna kepentingan BPBD dan masyarakat secara menyeluruh terkait dengan penanggulangan dini resiko bencana, hendaknya spesialisasi pegawai tentang penanggulangan dini resiko bencana dapat di tingkatkan melalui jalur pendidikan formal yang kosentrasi ilmunya erat kaitannnya dengan masalah-masalah resiko bencana di maksud.
 4. Guna tujuan merealisasikan semua yang sudah di sebutkan pada poin 1 sampai dengan poin 3, maka anggaran pendapatan dan belanja BPBD yang berkaitan dengan poin-poin tersebut dapat di tingkatkan lagi sesuai kebutuhan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1-5, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Tahun 2000.
- Arikunto, 2002, Metode Penelitian Sosial, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Bernardin dan Russel. 1998, *"Human Resource An Experiential Approach"*, Mc.GrawHill Internatioal Editions, United State.
- Dwiyanto, Agus. 2001, "Materi Kuliah Manajemen Strategis Sektor Publik," MAP UGM, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 1995, "Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik," Seminar sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Effendi, Sofian. 1991, "Sistem Administrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan", Samodra Wibawa (ed), Pembangunan Berkelanjutan Konsep dan Kasus, PT. Tiara Wacana Yogya.
- Manullang, M. 2002, "Dasar Dasar Manajemen", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, S.P., 2002, "Manajemen Strategik", Bumi Aksara, Jakarta,
- Sugiono, 2002. Metode Penelitian Administrasi Alfabate, Bandung.